

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan sebagai kebutuhan dasar selalu menempati prioritas yang tertinggi dalam pembangunan ekonomi nasional. Pentingnya peran pangan telah disampaikan dan diingatkan oleh Presiden RI pertama, Ir Soekarno yang mengutarakan bahwa persoalan pangan menyangkut mati hidupnya suatu bangsa. Meskipun disampaikan beberapa puluh tahun yang lalu, namun persoalan pangan masih tetap relevan hingga kini dan terus menjadi prioritas pembangunan nasional. Fakta sejarah telah membuktikan bahwa permasalahan pangan adalah sekaligus menjadi problem sosial, budaya, ekonomi dan politik. Terlebih lagi terdapat kenyataan bahwa negara-negara maju dan besar di dunia ternyata adalah produsen utama pangan dan penentu pasar pangan dunia (D.H. Azhari, Jurnal Analis Kebijakan Pertanian 2016).

Komitmen nasional dan dunia untuk mewujudkan ketahanan pangan didasarkan atas peran strategis perwujudan ketahanan pangan dalam : (i) memenuhi salah satu hak azasi manusia; (ii) membangun kualitas sumber daya manusia; dan (iii) membangun pilar bagi ketahanan nasional. Peran memenuhi salah satu hak azasi manusia dinyatakan dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, bahwa hak setiap orang untuk memperoleh pangan yang aman dan bergizi sama prinsipnya dengan hak memperoleh pangan yang cukup dan hak azasi manusia untuk bebas dari kelaparan (D.H. Azhari, Jurnal Analis Kebijakan Pertanian 2016).

Indonesia telah memiliki Undang-undang Pangan yang baru untuk menggantikan UU Nomor 7 Tahun 1996 yang telah berusia 16 tahun, yaitu UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dalam UU baru ini, persoalan pangan ditujukan untuk mencapai tiga hal sekaligus, yaitu kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Dengan demikian, UU baru ini akan

menjadi identitas baru atau aransemen kelembagaan baru bagi pembangunan pertanian dan pangan Indonesia.

1. Kedaulatan Pangan adalah Hak negara dan bangsa secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan memberikan hak masyarakat yang menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal;
2. Kemandirian pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai ditingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermartabat;
3. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif produktif secara berkelanjutan.

Bila tidak ada langkah kebijakan yang bersifat terobosan, maka Indonesia akan kembali menjadi pengimpor beras yang besar di dunia karena permintaan terhadap beras akan terus bertambah sebagai akibat dari peningkatan jumlah penduduk sementara pertumbuhan produksi yang cenderung melandai. Keadaan tersebut akan diperparah oleh kelangkaan air yang akan terjadi dimasa yang akan datang sebagai akibat meluasnya Sindroma Jawa yang menyebabkan terjadinya kelangkaan air pada daerah-daerah irigasi di Pulau Jawa yang tidak saja menyebabkan berkurangnya areal panen tetapi juga menurunnya produktifitas pertanian. Ada beberapa pendekatan yang diperlukan untuk memperbesar kapasitas produksi yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut diatas. Lakukan eksplorasi kawasan yang dianggap layak untuk dibangun infrastruktur irigasi. Paling tidak diperlukan tambahan areal irigasi baru antara 1,5 – 2 juta ha sampai dengan tahun 2020 di pulau-pulau besar di luar Jawa seperti Sumatra dan Sulawesi.

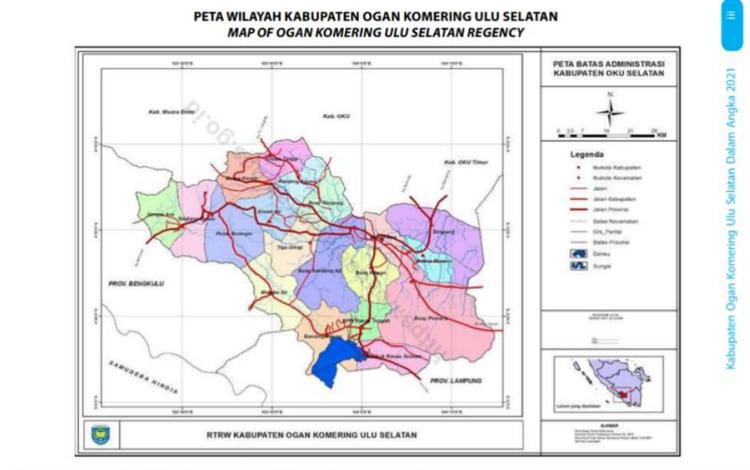
Perkembangan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur irigasi dari perspektif sejarah sangat erat kaitannya dengan ketahanan pangan nasional dan politik ekonomi dalam suatu kawasan atau suatu negara. Walaupun pembangunan irigasi di Indonesia telah berlangsung ribuan tahun ada periode-periode tertentu yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan infrastruktur irigasi untuk dapat dijadikan pelajaran pada masa yang akan datang. Ada empat periode yang perlu diperhatikan dengan masing masing periode mengandung ciri ciri tertentu. Keempat periode tersebut adalah periode prakolonial, kolonial, periode perang dingin, dan periode globalisasi (Barker and Molle, 2005). Pada periode prakolonial pembangunan irigasi dilakukan oleh masyarakat tani sendiri. Pada umumnya pembangunan irigasi mengikuti pembangunan persawahan dan dalam periode ini salah satu ciri yang menonjol adalah terbangunnya kapital sosial yang kuat dalam pengelolaan irigasi yang diwariskan dan dikembangkan lebih lanjut dari satu generasi kegenerasi berikutnya (Pasandaran, Jurnal Analis Kebijakan Pertanian 2016).

Pengelolaan infrastruktur irigasi yang menunjang irigasi masa depan diperlukan untuk terlaksananya multifungsi pertanian yaitu terwujudnya proses diversifikasi pertanian secara meluas, meningkatnya fungsi konservasi sistem irigasi, dan terpeliharanya warisan nilai-nilai budaya berupa kearifan lokal dan modal sosial dalam pengelolaan irigasi (Pasandaran 2007). Dalam rangka pengelolaan sumber daya air (irigasi) yang efisien, dan berdimensi pemberdayaan petani diperlukan penyesuaian kelembagaan, baik untuk kelembagaan pemerintah, swasta maupun petani (Rachman 2009). Pengelolaan irigasi memerlukan kelembagaan pengelolanya yaitu kepengurusan dan anggota serta berbagai norma yang menyertainya, agar efisien dalam pemanfaatannya dan tetap berkelanjutan. Dalam sistem irigasi, modal sosial merujuk pada sesuatu yang mendukung dan memungkinkan semua distribusi air dengan kriteria tepat jumlah dan tepat waktu untuk semua petani dalam satu daerah irigasi (T.B Purwamtini, 2017).

Dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional dan mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional

sebagaimana tercantum dalam prioritas pembangunan kelima Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional 2020-2025, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan program percepatan peningkatan tata guna air irigasi. P3-TGAI merupakan Program untuk memenuhi kebutuhan air irigasi yang merupakan kepanjangan dari Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi adalah program rehabilitasi, peningkatan, atau pembangunan Jaringan Irigasi dengan berbasis peran serta masyarakat petani yang dilaksanakan sendiri oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air, Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air atau Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air secara swakelola.

P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) adalah kelembagaan pengelolaan Irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola Irigasi. GP3A (Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air) adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerjasama memanfaatkan air Irigasi dan Jaringan Irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah Irigasi. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Kab. OKU Selatan) sendiri merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, dimana Kabupaten OKU Selatan ini merupakan Kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan Undang Undang No. 37 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003.



Gambar 1. 1.

Peta Wilayah Kabupaten OKU Selatan

Berdasarkan Data BPS yang termuat dalam “OKU Selatan Dalam Angka 2021 “, pada tahun 2020 luas panen padi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mencapai 52.904 ha, dengan komposisi 48.886 ha padi sawah dan 4.018 padi ladang. Luas penggunaan lahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada tahun 2020 terbagi menjadi pertanian sawah seluas 16.905 ha, pertanian bukan sawah sebanyak 469.410 ha, dan non pertanian sebanyak 63.079 ha. Dari lahan sawah seluas 16.905 ha, 15.707 ha merupakan sawah irigasi sedangkan sisanya 1.198 ha merupakan sawah non irigasi. Tabelberikut ini menunjukkan luas lahan sawah menurut kecamatan dan jenis pengairan data BPS tahun 2021.

Tabel 1.1 Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (ha) Tahun 2020

No	Kecamatan	Irigasi (Ha)	Non Irigasi (Ha)	Jumlah
1	Mekakau Ilir	670	-	670
2	Banding Agung	453	-	453
3	Warkuk Ranau Selatan	568	55	623
4	BPR Ranau Tengah	1249	-	1249
5	Buay Pemaca	1298	166	1464
6	Simpang	-	545	545
7	Buana Pemaca	460	76	536

8	Muaradua	837	90	927
9	Buay Rawan	295	50	345
10	Buay Sandang Aji	789	147	936
11	Tiga Dihaji	726	50	776
12	Buay Runjung	1715	-	1715
13	Runjung Agung	825	-	825
14	Kisam Tinggi	921	-	921
15	Muaradua Kisam	2114	19	2133
19	Kisam Ilir	592	-	592
17	Pulau Beringin	917	-	917
18	Sindang Danau	946	-	946
20	Sungai Are	332	-	332

Sumber :BPS – OKU Selatan Dalam Angka (Dinas Pertanian OKU Selatan)

Dari Tabel 1.1. terlihat bahwa sebgaaian besar Persawahan di Kabupaten OKU Selatan sudah memakai air bersumber dari Irigasi yakni sebesar 92,9 % sedangkan Non Irigasi sebesar 7,1 %. Kita ketahui bahwa kebutuhan petani akan air irigasi kian bertambah seiring dengan tuntutan untuk menghasilkan hasil panen yang berkualitas. Arah kebijakan pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi, salah satunya adalah peningkatan kinerja dalam pengelolaan saluran irigasi, mengingat kerusakan dan tidak berfungsinya jaringan irigasi disebabkan rendahnya kualitas operasi dan pemeliharaan. Oleh sebab itu peranan para petani yang tergabung dalam P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) sangat penting, akan tetapi untuk mengoptimalkan peranan mereka masih terkendala dengan Biaya Operasional untuk pemeliharaan dan perbaikan. Dimana untuk pemeliharaan dan perbaikan jaringan irigasi masih mengandalkan program kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten OKU Selatan, itupun tidak dilakukan pada semua Daerah Irigasi (D.I) dan tidak setiap tahun dianggarkan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Maruhum Simbolon dkk yang termuat dalam Jurnal “ *Analisis Komparasi Faktor-Faktor Produksi Dan Pendapatan Pada Usahatani Padi Lahan Sawah Dengan Sistem Irigasi Yang Berbeda Di Kecamatan Banyubiru (2021)*” menyimpulkan bahwa luas lahan, pestisida, benih dan tenaga kerja merupakan faktor yang tidak terlalu signifikan mempengaruhi produksi. Maruhum Simbolon dkk mendapatkan bahwa faktor

Pupuk dan Irigasi lah yang memiliki pengaruh yang cukup signifikan mempengaruhi produksi, dimana mereka mendapatkan produksi dan pendapatan petani sawah dengan irigasi sederhana lebih besar dari petani sawah hujan.

Tabel 1.1 Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Realisasi Panen Tahun 2020

No	Kecamatan	Sawah (Ha)	Realisasi Panen T. 2020 (Ton)
1	Mekakau Ilir	670	7.323,75
2	Banding Agung	453	4.212,90
3	Warkuk Ranau Selatan	623	6.249,60
4	BPR Ranau Tengah	1249	13.963,95
5	Buay Pemaca	1464	15.898,35
6	Simpang	545	4.329,15
7	Buana Pemaca	536	6.165,90
8	Muaradua	927	10.746,15
9	Buay Rawan	345	4.017,60
10	Buay Sandang Aji	936	11.192,55
11	Tiga Dihaji	776	9.225,60
12	Buay Runjung	1715	16.860,90
13	Runjung Agung	825	8.672,25
14	Kisam Tinggi	921	10.941,45
15	Muaradua Kisam	2133	20.250,75
19	Kisam Ilir	592	6.993,60
17	Pulau Beringin	917	9.639,45
18	Sindang Danau	946	9.885,90
19	Sungai Are	332	4.250,10

Sumber : Dinas Pertanian OKU Selatan

Dari data BPS untuk tahun 2020 rata-rata produksi padi nasional berada diangka 5,25 ton/hektar, sedangkan di Kabupaten OKU Selatan sendiri dari data tersebut diatas rata-ratadiangka 3,5 ton/hektar. Angka ini sangat jauh dari rata rata produksi nasional apa lagi bila dibandingkan dengan potensi padi inbrida yang berkisar 6 – 8 ton/hektar dan hibrida 10 – 12 ton/hektar. Dari latar belakang ini dan penelitian terdahulu diatas makapenelitian tertarik untuk menilit lebihlanjut mengenai peran irigasi sebagai faktor yang mempengaruhi produksi padi di Kabupaten OKU Selatan , terutama pada lahan sawah yang telah sepenuhnya

dilayani oleh irigasi dan yang sudah dikelola oleh P3Aserta mendapatkan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka masalah yang akan dikaji didalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penilaian infrastruktur Bangunan irigasi dengan terlaksananya program ini?
2. Adakah hubungan Pelaksanaan P3-TGAI ini dengan Produktifitas Padi di Kabupaten OKU Selatan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisa kondisi infrastruktur Bangunan Irigasi ;
2. Untuk menganalisa pengaruh Program terhadap produktifitas padi di OKU Selatan.

Kegunaan Penelitian antaralain :

1. Bagi Petani
 - a. memberikan informasi mengenai implementasi penerapan pelaksanaan P3-TGAI di Kabupaten Kabupaten OKU Selatan;
 - b. memberikan informasi kepada petani mengenai pentingnya peran P3A didalam mengelola dan menjaga kondisi bangunan irigasi.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk dijadikan acuan pengembangan dan perencanaan pelaksanaan kegiatan program sejenis yang akan datang;

3. Bagi Penelitian sejenis

Penelitian ini diharapkan dapat dikembang oleh para peneliti lainnya, untuk melakukan penelitian mengenai pemanfaatan jaringan irigasi di Kabupaten OKU Selatan sebagai penunjang pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi selain peningkatan produktifitas padi.